

PEMBANGUNAN DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI – HUBUNGAN DAN PENGARUHNYA*

Larry Diamond
diterjemahkan oleh
Ainur Rofieq

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" Bekasi

Abstract

Over the years the relationship between democracy and development has been comprehensively contested, and recent cross-national statistics as well as comparative historical data show that the relationship is not causal as conventionally perceived. Successful development has, for example, been achieved in both democracies and authoritarian regimes, and similarly democracy has been sustained in countries with lower GNP than the traditional minimum threshold of 300 USD per capita per year. The relationship is also complicated by conceptual challenges in different regions of the world: different cultures delineate democracy and development differently and there no exact definitions of the two concepts.

Kata Kunci: Pembangunan Demokrasi, Pembangunan Ekonomi, Demokratisasi

Pendahuluan

Dewasa ini kajian mengenai perbandingan demokrasi lebih menarik perhatian para ilmuwan dan mahasiswa dibandingkan dengan kajian tentang hubungan antara demokrasi dan pembangunan. Isu ini memiliki banyak segi tetapi harus dipahami hubungan timbal baliknya: bagaimana dampak dari pembangunan ekonomi terhadap sistem politik suatu negara yang demokratis dan yang tidak? Dan apa pengaruh demokrasi, khususnya bentuk atau tingkat demokrasi terhadap prospek pembangunan ekonomi?

Sejumlah asumsi berdasarkan literatur akademis terhadap isu ini patut dipertanyakan. *Pertama*, proposisi bahwa masa depan demokrasi berhubungan erat dengan tingkat perkembangan ekonomi. Sehingga perkembangan demokrasi akan rendah di negara yang miskin. *Kedua*, sejalan dengan pemikiran pertama bahwa orang-orang miskin tidak terlalu

perduli tentang hak-hak politik dan sipil hingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Hal ini menjelaskan argumen tentang pengaruh tipe-tipe penguasa terhadap pembangunan ekonomi. Penekanan utama pada tulisan ini adalah mengenai jalan pemikiran yang keliru terhadap pernyataan di atas dan perlu memandang lebih dalam ciri-ciri suatu penguasa. Hal ini sejalan dengan pertanyaan *ketiga*: Apakah pengaruh terhadap demokrasi pada kinerja sistem ekonomi yang ada? Asumsinya bahwa demokrasi harus memberikan kebutuhan-kebutuhan ekonomi jika ingin bertahan.

Tanpa perlu dipertanyakan lagi, keadaan ini sangat penting. Namun kita tidak boleh mengesampingkan pertanyaan mengenai proses politik dan keadilan. Argumentasinya adalah bahwa negara yang miskin memiliki perhatian pada demokrasi sama dengan negara yang makmur; negara-negara yang amat miskin lebih demokratis sekarang ini dari sebelumnya; demokrasi yang terdapat di negara yang berpendapatan rendah dan menengah sangat bergantung pada kinerja ekonomi; dan terdapat dua tantangan utama yaitu pertama, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas demokrasi, dan kedua merencanakan kebijakan yang khusus dan efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Sebelum membahas masalah tersebut, perlu diperjelas terlebih dahulu kata 'demokrasi'. Pengertian paling sederhana, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana semua warga negara dapat memilih dan mengganti pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan yang tetap, bebas, adil dan kompetitif.

Namun, untuk meningkatkan pembangunan yang menyeluruh, dibutuhkan demokrasi. Ada beberapa dimensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi:

- a. Memperluas kebebasan warga negara dan kelompok untuk menyampaikan pendapatnya, keyakinannya, berkelompok, berbicara, dan sebagainya;
- b. Memperluas keanekaragaman sumber-sumber informasi bagi organisasi swadaya masyarakat, dengan kata lain membentuk masyarakat sipil yang terbuka dan kuat;
- c. Kesamaan derajat semua warga negara di depan hukum;

- d. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang membawa pengaruh bagi kehidupannya untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan;
- e. Penegakan hukum dan perlindungan yang adil untuk menghindari ancaman terhadap hak-hak warga negara;
- f. Lembaga pengawas kekuasaan yang dilakukan lembaga legislatif yang netral, kehakiman, komisi anti korupsi, lembaga audit, dan lembaga-lembaga yang berwenang lainnya;
- g. Transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang memudahkan warga negara untuk memperoleh akses informasi; dan
- h. Kontrol sipil terhadap militer dan aparat keamanan negara lainnya.

Demokrasi dan Pembangunan

Hampir setengah abad, pemikiran bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tingkat pembangunan ekonomi suatu negara dengan demokrasi menjadi sebuah teori yang penting dalam ilmu sosial. Pada 1959, Seymour Martin Lipset menulis esainya yang terkenal "*Some Social Requisites of Democracy*" yang merupakan sebuah kajian yang sangat kuat memotret hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan demokrasi.ⁱ

Menurut *Human Development Index (HDI) United Nations Development Programme (UNDP)*ⁱⁱ, di antara 25 negara yang diurutkan berdasarkan 'human development' paling tinggi hanya Singapura saja yang tidak demokratis. Di antara 40 negara maju, hanya tiga negara kerajaan kecil kaya minyak - Kuwait, Bahrain, dan Brunei - yang masuk negara tidak demokratis. Dan dari 50 negara paling makmur, hanya dua negara saja yang menjadi pengecualian dan itu pun negara kecil kaya minyak, Qatar dan Uni Emirat Arab.ⁱⁱⁱ

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan kebebasan hak berpolitik dan sipil, diukur secara berkala oleh Freedom House, cukup menarik perhatian.^{iv} Pada kenyataannya, dari 50 negara maju, 44 negara diantaranya menganut demokrasi liberal, dengan pengecualian sebuah negara kepulauan kecil, Seychelles. Sebagian besar, 38 dari 44 negara, memiliki peringkat tertinggi kebebasan hak berpolitik dan kebebasan sipil.

Untuk negara demokratis non-liberal sekarang ini hanya muncul pada negara yang tingkat pembangunan ekonominya rendah.

Pada spektrum negara dengan tingkat pembangunan rendah, hubungan antara pembangunan dan demokrasi mengalami penurunan. Demikian pula jumlah negara-negara miskin yang mengadopsi sistem demokrasi. Dari 22 negara peringkat bawah UNDP HDI (2005), 9 (41%) negara saja yang menyelenggarakan pemilihan demokratis. Selanjutnya dari 37 negara berperingkat rendah hingga menengah HDI, 14 (38%) negara menganut demokrasi. Jika mengambil sepertiga dari distribusi terbawah, 39 persen merupakan negara yang relatif miskin dan saat ini menjadi demokratis. Banyak dari negara tersebut memiliki kualitas yang rendah, demokrasi yang illiberal dengan permasalahan serius di sektor pemerintahan dan dalam beberapa kasus tidak menjalankan pemilu yang demokratis.^v Dengan demikian, tetap tidak ada alasan historis bagi negara-negara miskin tersebut untuk menjadi demokratis.

Masih terdapat perdebatan mendasar mengenai hubungan antara pembangunan dan demokrasi serta antara pembangunan dan kebebasan. Beberapa ilmuwan sosial menganggap bahwa demokrasi akan mempercepat pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan bahwa demokrasi timbul di negara Barat yang protestan, kapitalis, dan liberal. Dengan demikian pembangunan diikuti atau berjalan bersama dengan demokrasi. Namun hubungan tersebut tidak bertahan lama ketika sejumlah negara miskin di Asia dan Amerika Latin berkembang dan menjadi demokratis.

Pada kenyataannya suatu negara dapat berkembang secara ekonomi dan bertransisi ke arah demokrasi didasarkan pada wilayah dan sejarahnya. Suatu negara yang otoriter dapat mengangkat negaranya ke level menengah atau menengah atas dalam hal tingkat pendapatan dan kemudian memberikan jalan ke arah demokrasi. Sesungguhnya, di luar negara Barat, antara demokrasi dan pembangunan memiliki hubungan yang kuat. Ahli ekonomi dari Universitas Stanford, Henry Rowen, 1990, mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan kebebasan yang kuat meskipun demokrasi Barat tidak dimasukkan. Sebenarnya, terdapat hubungan yang kuat antara pembangunan ekonomi dan kebebasan di semua tingkatan kecuali di dunia

Arab. Rowen menyimpulkan bahwa hasil tersebut mendukung anggapan demokrasi yang mapan hanya sebuah fenomena di negara-negara Barat.^{vi}

Kenyataan tersebut memunculkan dua kemungkinan. *Pertama*, pembangunan membawa transisi ke arah demokrasi. *Kedua*, sejalan dengan argumentasi awal Lipset, pembangunan mendukung demokrasi kapan pun itu timbul. Kedua kemungkinan tersebut tampak benar adanya. Studi yang lebih mendalam tentang perubahan kekuasaan antara 1850 dan 1990 menemukan bahwa tingkat pendapatan per kapita memiliki dampak positif terhadap transisi ke arah demokrasi. Seperti terjadi pada era sebelum Perang Dunia II, meskipun efeknya masih kuat hingga saat ini pada tingkatan rendah hingga menengah dari pembangunan. 'Meningkatnya pembangunan selalu memperbesar kemungkinan terjadinya transisi demokrasi.'^{vii}

Perubahan Sosial dan Tumbuhnya Sikap dan Nilai Baru

Pembangunan ekonomi mengubah masyarakat menjadi beberapa bentuk yang membuat masyarakat sulit untuk mendukung kekuasaan pada satu orang, satu partai atau sekelompok elite. Hal ini dikarenakan, *pertama*, pembangunan ekonomi mengubah kondisi sosial dan struktur ekonomi negara, lebih luas lagi pada kekuasaan dan sumberdaya. *Kedua*, pembangunan ekonomi mengubah lebih dalam sikap dan nilai menurut cara demokrasi.

Dari sisi struktural, pembangunan ekonomi memperluas kelas menengah dan meningkatkan taraf pendidikan dan informasi di antara masyarakat. Ketika suatu negara telah mencapai taraf pembangunan dan pendapatan nasional pada level menengah, maka ketidakadilan cenderung menurun yang akan mengurangi ketimpangan sosial dan polarisasi politik antar kelompok. Bagi Lipset, jauh sebelum Gelombang Demokrasi Ketiga muncul, hal ini merupakan faktor yang menentukan agar demokrasi tampak nyata: 'pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan, tingkat keamanan ekonomi yang tinggi, dan berkembang luasnya pendidikan, yang dapat membentuk 'perlawanan kelas'.^{viii} Beberapa tahun kemudian, ahli politik dari Princeton University, Carles Boix, menunjukkan bahwa kondisi tersebut bukan hanya sekedar teori. Ketika negara berkembang, pendapatan menjadi terdistribusi secara merata, yang mengurangi ancaman

dari pajak berlebih dan konflik kelas dan memungkinkan orang-orang yang kaya memaklumi kondisi yang serba tidak pasti dari aturan yang otoriter dan semakin sedikit yang berharap untuk perubahan. Karenanya, kesetaraan yang besar akan meningkatkan kesempatan keduanya untuk suatu transisi ke demokrasi dan kemudian untuk bertahan.^{ix}

Sering pembangunan ekonomi juga menyusun kembali koalisi kepentingan menjadi lebih lihai dan elite yang visioner menyadari bahwa yang meremukkan dari ancaman ekstrimis memandang suatu diktator yang usang; pembangunan yang tidak seimbang di bawah rezim otoriter – seperti di Brazil dan Afrika Selatan – harus dikurangi untuk memelihara stabilitas negara; atau kelompok-kelompok sosial harus dimasukkan ke dalam sistem politik itu. Lebih luas lagi, akan terjadi penurunan jumlah kekuatan kelas menengah. Di dalam masyarakat yang meningkat pembangunannya ekonominya, kelompok kelas menengah ‘akan mengalami peningkatan kepercayaan diri yang akan membantu minat mereka dalam pilihan politik’.^x

Munculnya kelas menengah baru ini oleh ilmuwan sosial Daniel Lerner disebut sebagai ‘*psychic mobility*’.^{xi} Ketika orang meninggalkan kawasan perdesaan menuju kota, mereka mengadopsi pula sikap dan kepercayaan politik yang baru. Adanya revolusi teknologi, kemampuan untuk mengakses informasi dan berita dapat dengan mudah diperoleh melalui radio, televisi, website, blog, dan jaringan berita internasional, yang kesemuanya sangat sulit dikontrol oleh rezim yang otoriter dibandingkan kontrol terhadap media massa di masa lampau. Ketika seseorang memperoleh pendapatan yang lebih banyak dan informasi yang lebih cukup, timbul kesadaran dan kepercayaan politiknya serta cenderung ikut berpartisipasi di dalam dunia politik untuk ikut memikirkan dirinya dan memutus hubungan tradisional patron-client.

Dengan perubahan sosial dan psikologis yang besar, berakibat pada tumbuhnya berbagai bentuk organisasi, seperti organisasi profesional, organisasi kemahasiswaan, kelompok dagang, lembaga pembela hak asasi manusia, yang memperjuangkan kepentingan dan keinginan mereka. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang independen dalam hal jumlah, sumberdaya dan pengalaman, membuat mereka semakin berani berhadapan dan mengawasi negara serta menciptakan landasan

terbentuknya *civil society*. Jadi, semakin makmur suatu negara, terjadi keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat.

Lebih lanjut, bahwa masyarakat yang meningkat secara ekonomi akan mendukung peningkatan nilai-nilai demokrasi: tingkat pendidikannya, tingkat pendapatannya, pengaruh media dan status pekerjaan. Lebih khusus lagi, semakin terpelajar seseorang akan cenderung untuk toleran terhadap perbedaan, menghargai hak-hak kelompok minoritas, nilai-nilai kebebasan dan kepercayaan pada orang lain. Mereka juga aktif berpartisipasi dan bergabung dalam organisasi politik serta memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pemerintah.^{xii} Beberapa nilai demokratis tersebut muncul pada kehidupan di negara maju dan kebebasan individu akan status sosial ekonominya.^{xiii}

Ketika seseorang menganut nilai-nilai kebebasan berekspresi, mereka membutuhkan demokrasi – dan tidak sekedar demokrasi, melainkan kelembagaan yang demokratis untuk menjamin kebebasan individu.

Apakah Demokrasi Merupakan Barang Mewah bagi Negara Miskin?

Analisis di atas menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pembangunan ekonomi dan demokrasi yang liberal atau yang berjalan dengan baik. Namun ini masih diperdebatkan, dimana masyarakat miskin di negara yang berpendapatan rendah masih harus memperjuangkan kebutuhan untuk hidup sehingga mereka relatif apatis atau tidak mendukung demokrasi. Bagaimana pun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Nilai-nilai liberal akan akuntabilitas dan aturan hukum lebih tersebar pada penduduk di negara-negara maju, namun anehnya cita-cita akan demokrasi menyebar lebih universal.

Demokrasi amat lemah dan harus berhadapan dengan berbagai kesulitan yang serius di banyak negara miskin, bahkan yang berpendapatan menengah. Tetapi umumnya di negara-negara tersebut permasalahan dari demokrasi adalah lemahnya dan pengkhianatan kelompok elite dibandingkan dengan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri.

Contoh yang kuat menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya sekedar sebuah pertunjukan bagi orang miskin melainkan sebuah kebutuhan. Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1998 Amartya Sen

menunjukkan bahwa demokrasi tidak memiliki kelemahan. Hal ini dikarenakan alur informasi berjalan lancar ketika terjadi kasus kelaparan di belahan dunia lain, sementara suatu mekanisme tanggung jawab politis dilakukan untuk mengajak para politisi untuk mau mendengarkan. Di samping itu, Sen berpendapat bahwa orang-orang tidak akan mudah memahami kebutuhannya secara tepat sampai mereka menentukan apa yang mungkin. Dengan demikian, 'Selain kebutuhan ekonomi, orang membutuhkan saluran aspirasi politik. Demokrasi bukan barang mewah yang harus menunggu datangnya kemakmuran, dan hanya terdapat sedikit bukti dimana orang-orang miskin yang akan menolak demokrasi jika mereka diberikan suatu pilihan.^{xiv} Banyak kasus yang terjadi dimana sekelompok masyarakat miskin bergerak untuk melakukan (dan membela) perubahan yang demokratis, dan fakta yang terjadi, seperti yang terjadi di Burma, kekuatan itu dihancurkan oleh kekuatan yang sedang berkuasa, sementara dunia hanya memantau dan memprotes tanpa hasil. Kekuatan tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghancurkan hak milik masyarakat.

Sen berpendapat bahwa tanda dari nilai yang universal tidak harus memperoleh persetujuan yang sama untuk semua orang, tetapi setiap orang dimana pun memiliki alasan untuk melihatnya sebagai sesuatu yang bernilai.^{xv} Berdasarkan ukuran ini, akan muncul bukti di segala bentuk bahwa demokrasi menjadi nilai yang benar-benar universal.

Berdasarkan data survey pendapat umum diperoleh hasil bahwa masyarakat pada umumnya di berbagai kawasan mengetahui benar mengenai demokrasi. Umumnya, jawaban akan pertanyaan nilai-nilai demokrasi yang berbeda-beda menunjukkan komitmen yang tinggi pada demokrasi di masyarakat non-Barat. Lebih lanjut, ketika kawasan atau kelompok-kelompok masyarakat (dan pasti di suatu negara) berbeda tingkat komitmen mereka terhadap nilai-nilai demokrasi, perbedaan itu tidak selalu searah dengan teori budaya yang diharapkan.

Hasil survey yang dilakukan *World Values* menunjukkan bahwa keyakinan akan demokrasi sebagai sistem yang terbaik memperoleh dukungan yang amat banyak. Sedangkan ada satu pilihan yang sedikit lebih tinggi di antara negara-negara industrialis Barat, dimana tidak kurang dari 80 persen secara rata-rata menyatakan demokrasi sebagai sistem yang terbaik. Demikian pula mayoritas di setiap kawasan juga menghargai

kekuasaan yang ada. Tetapi, tidak terdapat perbedaan yang cukup besar di negara-negara Barat, Asia dan Eropa Timur, sedangkan kondisi itu berbeda di bekas Uni Soviet, dan terutama di kawasan Amerika Latin dan negara-negara muslim Timur Tengah.

Apa yang dapat dipelajari dari studi perbandingan wilayah tersebut? Salah satu pelajaran penting adalah untuk lebih berhati-hati terhadap stereotip dan asumsi yang didasarkan pada teori-teori budaya. Terdapat keinginan yang kuat untuk menyebarkan demokrasi ke seluruh kawasan, termasuk di Afrika sebagai kawasan paling miskin di dunia. Cukup mengejutkan bahwa terdapat komitmen yang kuat untuk berdemokrasi. Tiga dari lima warga menyatakan bahwa demokrasi lebih diminati dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya – lebih besar dibandingkan di Amerika Latin dan bekas Uni Soviet.^{xvi} Kenyataannya, di setiap kawasan utama di luar negara Barat, mayoritas menghendaki demokrasi.

Mendukung Demokrasi di Negara-negara Miskin

Jika demokrasi ingin langgeng maka diperlukan legitimasi. Menurut sejarah, mayoritas negara-negara terbelakang, demokrasi dilaksanakan secara buruk, baik secara ekonomi maupun politik, dan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang semu, ketidakadilan hukum, korupsi yang merajalela serta penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat kehilangan kepercayaan akan demokrasi. Sehingga memudahkan politisi yang ambisius dan perwira militer untuk menumbangkan demokrasi atas nama pembangunan. Keadaan ini menjadi nasib bagi sebagian besar negara-negara demokrasi baru di Asia dan Afrika setelah dekolonisasi pasca Perang Dunia II. Hal tersebut berulang kali terjadi di banyak negara berpenghasilan rendah, seperti Pakistan, Bangladesh, Nigeria dan Kenya. Lalu terdapat sejumlah rezim '*hybrid*' atau '*electoral authoritarian*' yang menggabungkan sistem pemilihan multipartai dengan kontrol kuat dari partai yang berkuasa terhadap negara serta mekanisme pemilihan yang tidak sejalan dengan sistem demokrasi. Rezim *hybrid* dapat ditemukan di berbagai negara dengan berbagai tingkat pembangunan ekonomi, dari Singapura dan Malaysia di satu sisi hingga Kamboja, Tanzania dan Maroko di sisi lain. Mereka juga sangat bervariasi dalam hal tingkat sosial dan pluralisme politik serta tingkat represinya.

Asumsi dasar, bahwa negara-negara miskin mungkin akan mengalami kegagalan berdemokrasi, jika mereka melakukan transisi menuju demokrasi menggunakan cara pandang yang berbeda, dimana pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kelangsungan hidup demokrasi di negara-negara miskin. Demikian pula Lipset, yang berpikir mengenai hubungan antara legitimasi dan efektivitas kinerja, terutama dalam hal kinerja ekonomi.^{xvii}

Tetapi terdapat dimensi yang berbeda antara kinerja pemerintahan dan legitimasi. Kita tidak boleh berasumsi bahwa orang hanya menilai pembangunan ekonomi saja. Setelah

Pada sepuluh tahun yang lalu, dengan pertumbuhan 'barometer' regional akan sikap dan nilai menuju demokrasi di seluruh dunia, kita dapat memperoleh dasar yang menyeluruh dan cukup untuk menilai hubungan antara kinerja pemerintahan dan legitimasi. Ketika diperiksa hasil survey yang dilakukan di Asia Timur, Asia Selatan, Amerika Latin, Afrika dan dunia Arab, menunjukkan bahwa 'faktor ekonomi relatif tidak berpengaruh dalam menjelaskan tingkat dukungan terhadap demokrasi'.^{xviii} Kepuasan dan dukungan terhadap demokrasi dibentuk oleh bagaimana demokrasi mampu memberikan apa yang diharapkan dari demokrasi itu sendiri - pemilu yang bebas dan jujur, kebebasan individu, penegakan hokum dan akuntabilitas (khususnya penanganan korupsi)

Kesimpulan ini dapat dilihat secara positif dan negatif. Secara negatif, akan muncul penurunan dukungan terhadap demokrasi ketika masyarakat mengalami pemerintahan yang buruk, atau terjadi penurunan tajam pada parameter kinerja demokrasi. Untuk memperdalam mengenai korupsi dan kroni terhadap demokrasi seperti yang terjadi di Filipina antara tahun 2001 dan 2005 dapat dilihat Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perubahan dukungan terhadap demokrasi di Filipina

Pernyataan	2001	2005
Demokrasi selalu lebih disukai	64%	51%
Demokrasi cocok untuk Negara kami	80%	57%
Kepuasan terhadap cara kerja demokrasi di Negara kami	54%	39%
Persentase menolak alternatif pemimpin otoriter yang kuat	70%	59%

Analisa survey awal yang dilakukan Afrobarometer dari tahun 2000 hingga 2002, Bratton, Robert Mattes dan E. Gyimah-Boadi, menemukan bahwa faktor yang paling kuat pembentuk 'dukungan terhadap demokrasi' (merupakan gabungan antara tingkat kepuasan terhadap demokrasi dan tingkat persepsi terhadap demokrasi) lebih kepada kinerja sistem. Sesuai dengan yang umum terjadi pada model neo-patrimonial, penilaian terhadap kinerja lembaga kepresidenan memiliki dampak paling kuat bagi dukungan demokrasi, serta faktor kepercayaan warga terhadap pemilu yang bebas dan adil yang hampir sama kuatnya. Faktor lainnya adalah kinerja pemerintahan secara keseluruhan dalam hal ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan; penanganan terhadap korupsi; kepercayaan terhadap institusi Negara; dan persepsi akan perlindungan hak-hak politik serta perlakuan yang adil terhadap kelompok etnis tertentu.^{xix} Analisa data 2005, Bratton menemukan bahwa pelaksanaan pemilu yang bebas dan jujur menjadi faktor yang sangat kuat dalam membentuk perasaan demokrasi warga negara. Jadi, kinerja penguasa tidak lagi mampu mencukupi keinginan publik dan lembaga-lembaga formal mulai lebih berarti dibandingkan lembaga-lembaga informal.^{xx}

Kesimpulan

Opini publik memberikan pandangan baru akan berbagai kemungkinan pelaksanaan demokrasi di negara miskin. Demikian pula halnya bahwa masyarakat miskin bukannya tidak menghargai demokrasi, namun mereka juga tidak mengharapkan bahwa demokrasi akan mampu mengubah kehidupan mereka dalam waktu singkat. Namun, masyarakat miskin dan publik pada umumnya di negara yang berpendapatan rendah makin menyadari bahwa pemilu yang bebas dan adil, pengadilan yang mudah diakses oleh semua kalangan dan pemerintahan yang bersih merupakan instrumen penting bagi pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Kualitas pemerintahan adalah begitu penting dan terkadang sering dilupakan pengaruh variabel demokrasi dan pembangunan. Sekali kita memperhatikan akan hal itu dan fokus pada peningkatan lembaga pemilu yang adil dan netral; kebebasan dan kemampuan lembaga peradilan; keterwakilan, kapasitas dan aksesibilitas partai politik dan lembaga perwakilan di semua level; dan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan anggaran bagi kesejahteraan rakyat, kita dapat

menemukan bahwa demokrasi tidak hanya sejalan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki peran utama dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat.

*Tulisan diterjemahkan dari judul aslinya “Democratic Development and Economic Development – Linkages and Policy Imperatives” yang disampaikan Larry Diamond pada *International IDEA Democracy Round Table in Partnership with CSDS*, New Delhi, 17-18 Juni 2008.

ⁱ Seymour Martin Lipset, ‘Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy’, *American Political Science Review*, 53 (March 1959), pp. 69-105; and Larry Diamond

ⁱⁱ See United Nations Development Programme, *Human Development Report 2004* (New York: UNDP, 2004), pp. 258-9

ⁱⁱⁱ United Nations Development Programme, *Human Development Report 2006* (New York: UNDP, 2006), table 1, p. 283. Cuba is ranked 50 by the UNDP, but speciously, as the ranking is based on only two of the three indicators (health and education, not income). If the per capita income data were available, Cuba would rank well below 50, and I therefore exclude Cuba from the rankings here.

^{iv} Diamond, ‘Economic Development and Democracy Reconsidered’: and Rowen, Henry S., ‘The Tide Underneath the “Third Wave”’, *Journal of Democracy*, 6 (January 1995), pp. 52-64.

^v In other words, whether elections are truly free and fair. With only a very few exceptions, I rely on the annual classification of Freedom House as to which countries qualify as electoral democracies, but one could argue that in some cases the countries they consider democracies are really better considered ‘electoral authoritarian’.

^{vi} Rowen, ‘The Tide Underneath the “Third Wave”’, p. 55

^{vii} Boix, Carles and Stokes, Susan C., ‘Endogenous Democratization’, *World Politics*, 55 (July 2003), p. 531. Ronald Inglehart and Christian Welzel reach a somewhat similar conclusion using data from 1950-90 in their *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 169. Both studies specifically reject the finding of Adam Przeworski and his colleagues that the likelihood of the emergence of democracy is not related to the level of economic development. Przeworski, Adam, Alvarez, Michael E., Cheibub, Jose Antonio and Limongi, Fernando, *Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

^{viii} Lipset, Seymour Martin, *Political Man: The Social Bases of Politics* (Baltimore Md: John Hopkins University Press, 1981), p. 45. The book was originally published in 1960, and the chapter from which this is drawn essentially reproduces his 1959 article, ‘Some Social Requisites of Democracy’.

^{ix} Boix, Carles, *Democracy and Redistribution* (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2003).

^x Huntington, Samuel, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (London: University of Oklahoma Press, 1991), p. 67. This was not simply the result of economic development, however. In much of Latin America, the power of populist groups often decreased precisely because of repression under authoritarian rule.

^{xi} Lerner, Daniel, *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East* (New York: Free Press, 1958).

^{xii} The early studies establishing this were Almond, Gabriel and Verba, Sidney, *The Civic Culture* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963) and Inkeles, Alex, ‘Participant Citizenship in Six Developing Countries’, *American Political Science Review*, 63 (1969), pp. 1120-41. But these associations also emerge in most of the recent studies of attitudes and values towards democracy as well as in the research associated with the World Values Survey. See Inglehart and Welzel, *Modernization, Cultural Change and Democracy*, and the sources they cite on p. 164.

^{xiii} Inkeles, Alex and Diamond, Larry J., 'Personal Development and National Development: A Cross-National Perspective', in Alexander Szalai and Frank M. Andrews (eds), *The Quality of Life: Comparative Studies* (London: Sage, 1980), pp. 73-109.

^{xiv} Sen, Amartya, 'Democracy as a Universal Value', in Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), *The Global Divergence of Democracies* (Baltimore, Md: John Hopkins University Press, 2001), p. 13.

^{xv} Sen, 'Democracy as a Universal Value', p. 12.

^{xvi} This question is not a simple yes/no question, but allows two other potentially plausible options: 'In some circumstances a non-democratic government can be preferable' or 'For someone like me, it doesn't matter what kind of government we have'. Wording varies slightly across the regional barometers. This one is drawn from the Afrobarometer,

<http://www.afrobarometer.org/questionnaires/nig-R3Questionnaire-23aug05.pdf>.

^{xvii} See Lipset, *Political Man*, pp. 64 – 70.

^{xviii} Yun-han Chu et al., 'Public Opinion and Democratic Legitimacy', *Journal of Democracy*, 19 (April 2008), p. 75.

^{xix} Bratton, Michael, Mattes, Robert and Gyimah-Boadi, E., *Public Opinion, Democracy, and Market Reform in Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) pp. 272-7. These results are based on analysis of the first two rounds of surveys (around 2000 and 2002), not on the third round in 2005.

^{xx} Bratton, Michael, 'Formal versus Informal Institutions in Africa', *Journal of Democracy*, 18/3 (July 2007), pp. 81-95, table 2.